

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM
MEMPERTAHANKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD) OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DI
BKAD KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Alif Shihab Maulana
NPP. 29.1569

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: maulanaalif4321@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Unqualified Opinion has been obtained by the city of Kendari 8 times in a row. Fixed asset management is one of the most highlighted things in order to maintain an Unqualified Opinion. Purpose:* This study aims to find out how to optimize fixed assets in Kendari City, the inhibiting factors and what are the local government's efforts in maintaining the Local Government Report (LKPD) with Unqualified Opinions in the city of Kendari.. **Method:** *This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Result:* The results show that the implementation of fixed asset management in Kendari City has been going well **Conclusion:** the implementation of fixed asset management is going well , but there are still various obstacles such as difficulties in obtaining evidence of completeness of fixed assets, quality of human resources, overlapping duties of employees, and the lack of government's role in looking at potential assets BKAD's efforts are to complete documents for fixed assets, submit to MP-TGR for lost assets, and conduct training for employees. For suggestions, it is hoped that BKAD can carry out direct checks on the condition of assets, complete documents for ownership of fixed assets, and increase the allocation of APBD funds for asset maintenance.

Keywords: *optimization of fixed assets, WTP opinion, LKPD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Opini Wajar Tanpa Pengecualian telah di peroleh oleh kota Kendari sebanyak 8 kali berturut –turut. Pengelolaan aset tetap adalah salah satu hal yang paling di sorot untuk tetap mempertahankan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pengoptimalisasian aset tetap di Kota kendari , faktor yang menjadi penghambat dan apa yang menjadi upaya pemerintahan daerah dalam mempertahankan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) opini Wajar tanpa Pengecualian di kota Kendari **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara , serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kota Kendari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat berbagai hambatan **Kesimpulan:** pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kota Kendari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap, kualitas SDM, adanya tumpang tindih tugas pegawai, dan kurangnya peran pemerintah dalam melirik aset potensial. adapun upaya BKAD adalah melengkapi kelengkapan dokumen atas aset tetap, pengajuan ke MP-TGR atas aset hilang, dan melakukan pelatihan pada Pegawai. Untuk saran diharapkan BKAD dapat melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait kondisi aset, melengkapi dokumen tanda kepemilikan aset tetap, dan penambahan alokasi dana APBD untuk pemeliharaan aset

Kata kunci: optimalisasi aset tetap, opini WTP, LKPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat signifikan di Indonesia terutama dalam proses pelaksanaannya yang sebelumnya sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Keterbukaan Terhadap masyarakat harus selalu di lakukan salah satunya dengan selalu menunjukkan kinerjanya serta memberikan informasi kepada masyarakat melalui laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) demi terwujudnya asas transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Desentralisasi pemerintah terdiri dari desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal, yang di mana desentralisasi fiskal adalah hubungan keuangan pusat dan daerah terkait pengelolaan keuangan hingga Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKDP) merupakan Laporan keuangan yang di susun dan di laksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan laporan di lakukan oleh daerah yang selanjutnya akan serahkan laporkannya ke Pemerintah Pusat melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Laporan keuangan, tersebut di lakukan sesuai dengan hukum yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan BPK yang berperan sebagai auditor, atau pemeriksa Laporan, keuangan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

BPK adalah badan yang independen dan tidak terikat oleh pemerintah. Pasal 23 ayat 5 (lima) UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan auditor eksternal yang bertugas memeriksa keuangan negara

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu akan disampaikan kepada DPR/DPD. Kemudian hasil dari peninjauan tersebut di berikan suatu yang berupa pendapat atau penilaian yang di sebut opini Laporan Keuangan.

Opini auditor terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan di berikan apabila hasil dari evaluasi dari BPK telah sesuai dan memenuhi Standar, Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di tentukan, maka evaluasi akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya hasil evaluasi tersebut mencapai tingkatan kesesuaian dan kewajaran dengan tidak di temukan kesalahan-kesalahan dan telah sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan yang baik dapat di tandai dengan tercapainya opini WTP. Pemerintah akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang dapat menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP. Opini WTP telah di raih 364 pemerintah kabupaten dari total 415 pemerintah kabupaten di Indonesia, dan 87 pemerintah kota dari 93 pemerintah kota di Indonesia. Pencapaian tersebut di anggap sudah melampaui target kinerja dari keuangan daerah di bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan dari kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang di tetapkan pada RPJMN 2015-2019

Berdasarkan Hasil audit dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang baik sehingga Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD nya masing-masing. Begitu juga dengan pemerintah Kota kendari yang telah mencapai pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 8 tahun berturut-turut. hal ini menunjukkan prestasi tersebut masih dapat di pertahankan tiap tahunnya.

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD

TAHUN	OPINI	Ket
2013	WTP	DPP
2014	WTP	DPP
2015	WTP	DPP
2016	WTP	DPP
2017	WTP	DPP
2018	WTP	DPP
2019	WTP	DPP
2020	WTP	DPP

BKAD Kota kendari tetap menargetkan dan mengupayakan agar opini WTP tersebut masih dapat dipertahankan dari tahun ke tahun dengan meminimalisir paragraf penjelas dari BPK terutama masalah aset tetap

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Namun walaupun telah delapan tahun berturut-turut telah mencapai predikat WTP, masih juga tidak Lepas beberapa catatan kecil berupa paragraf penjelas dari BPK yang masih sangat perlu di perhatikan. Hal ini berkaitan pada kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama dalam pengelolaan aset tetap yang tidak tertib

Tabel 1.2
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Tanah	414,897,330,780.00	
2.	Peralatan dan Mesin	532,676,182,983.64	
3.	Gedung dan Bangunan	997,810,181,183.03	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,132,661,545,721.96	
5.	Aset Tetap Lainnya	100,469,686,069.32	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	113,010,570,421.79	
	Jumlah	4,856,525,497,159.73	

Sumber: data BKAD KOTA KENDARI

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah aset tetap yang di miliki Kota Kendari sebesar 4,856,525,497,159.73. Namun berdasarkan wawancara secara via telfon bersama salah satu pegawai BKAD di bidang aset masih terdapat miliaran aset tidak dapat di telusuri lagi keberadaannya. Hal ini di sebabkan karena Informasi yang tercatat dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang masih kurang Lengkap dan belum di beri label kode barang pada seluruh aset tetap. Selain itu, dari data aset tetap tahun 2020 tersebut masih terdapat beberapa unit kendaraan dinas/operasional bukti kepemilikannya seperti BPKB tidak dapat di tunjukkan. Permasalahan aset tetap Lainnya bersumber dari BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2020 bahwa terdapat banyak aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat sebagai tanda kepemilikan

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi mempertahankan opini WTP maupun dari inventarisasi aset tetap. Penelitian oleh Kusuma Isbi Rahmadani dengan judul Strategi Mempertahankan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Salatiga 2016). Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah kota salatiga dalam mempertahankan opini WTP tersebut yaitu: Pertama butuhkan komitmen dari pimpinan serta dari bawahan sebagai komponen utama. Kedua, melakukan peningkatan pada pengelolaan BMD dan piutang daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas dari SDM. Keempat, membentuk tim penyusun Laporan keuangan. Kelima, meningkatkan teknologi informasi yang dimiliki. Keenam, meningkatkan auditor internal yaitu inspektorat. Dan selama pelaksanaan sering ditemukan kendala dalam mempertahankan opini WTP yaitu pemutasian jabatan. Selanjutnya yang menjadi referensi saya adalah penelitian Petra Yosalya Molle yang berjudul Strategi, Pengelolaan Aset, Tetap dalam Meningkatkan, Opini Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi, Maluku (studi pada penatausahaan aset tetap di BKAD 2017) adapun strategi BKAD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meliputi pertama Mempermudah dari pengelolaan aset tetap sesuai dengan dasar-dasar hukum dengan penggunaan dari teknologi yang mempunyai kedua Meningkatkan pemantauan di Lapangan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aset daerah ketiga pengoptimalan sistem akuntansi dengan menggunakan teknologi yang ada serta penefektifan struktur dari kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penggunaan Barang Milik Daerah yang terakhir Penelitian yang dilakukan oleh, Endah Dwi Kusumastuti, Imas Sukmawati, dan Suji Abdullah Saleh yang berjudul Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung 2019) Untuk Inventarisasi Aset tetap Daerah tidak terduga berpengaruh terhadap kualitas WTP, dikarenakan indikator yang mempengaruhi opini yaitu kondisi keuangan pemerintah daerah dalam keadaan baik, sedangkan inventarisasi Aset merupakan Sebagian dari banyaknya faktor yang berpengaruh pada kualitas dari opini WTP.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, terdapat perbedaan focus dan lokusnya dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan Opini WTP teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. menggunakan teori dari Siregar (2016: 91) mengenai manajemen aset daerah yang terdiri dari: inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian, yang akan dibahas guna memperoleh opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah opini wajar tanpa pengecualian di BKAD kota Kendari serta faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan BKAD kota Kendari dalam mengatasi hal tersebut

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian tentang pengelolaan aset tetap di Kota Kendari. Dalam penentuan informan didasarkan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel guna memberikan informasi secara tepat dan akurat sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data serta keterangan mengenai optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kota Kendari dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Untuk sumber data, penulis menggunakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan guna memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Kendari.

Data primer yang meliputi hasil wawancara dari 7 informan yaitu pegawai dan ASN BKAD yang dianggap ahli atau mengerti di bidang pengelolaan aset tetap, hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan mengenai pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Kendari. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti guna melaksanakan penelitian yakni meliputi: Dokumen-dokumen mengenai aset yang ada di Kota Kendari, Dokumen mengenai pemindahtanganan aset tetap Kota Kendari, Dokumen mengenai kepemilikan aset tetap di Kota Kendari

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori optimalisasi peneglolaan aset tetap menurut teori dari siregar (2016:91)

3.1 Pengeloan Aset

Pengelolaan aset tetap di Kota Kendari, adapun aset tetap tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Berkaitan dengan kondisi dari aset tetap yang dikelola oleh BKAD Kota Kendari, berikut ini merupakan jumlah keseleuruhan aset tetap yang dimiliki pemerintah Kota Kendari per 31 Desember 2020 yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah	197.279.759.302,34	
2.	Peralatan dan Mesin	545.887.292.178,47	
3.	Gedung dan Bangunan	1.042.186.207.198,42	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.111.026.702.280,27	
5.	Aset Tetap Lainnya	18.473.568.042,73	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.438.438.649,86	
	Jumlah	3.958.291.967.652,09	

Sumber: BKAD Kota Kendari 2020

BKAD mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta harus menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Aset yang dikenal sebagai Laporan Posisi Keuangan dan menyajikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun periode anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta tata kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Aset tetap merupakan salah satu komponen yang termuat dalam neraca daerah Kota Kendari. Kota Kendari telah mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali dengan 9 diantaranya didapatkan secara berturut-turut. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap seperti aset tetap tanah yang belum bersertifikat, dan aset tetap peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan dinas yang bermasalah seperti tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan atas kendaraan dinas tersebut, seperti tidak memiliki Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selain permasalahan mengenai aset tetap peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan atas kendaraan dinas, permasalahan selanjutnya yaitu terdapat aset tanah pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat. Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset tetap yang ditangani oleh BKAD pada dasarnya mempengaruhi atas pemberian opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah, BKAD berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam mengelola aset daerah, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap. Penelitian ini disusun oleh peneliti dengan melakukan analisis data yang diperoleh di lapangan, baik berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya atau yang dianggap memiliki keahlian dibidangnya (purposive sampling) serta didukung oleh data sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aset daerah terkhusus aset tetap. Peneliti menguraikan berbagai data tersebut dalam bagian pembahasan ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset tetap di Kota Jambi dengan didasarkan teori dari Siregar (2016: 91) yang membagi Manajemen Aset kedalam berbagai tahapan seperti berikut ini:

1. Identifikasi dan inventarisasi
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian

3.2 Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari telah dilaksanakan terhadap aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian. BKAD selaku pembantu pengelola dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset tetap tersebut selalu berkoordinasi dengan seluruh personil yang terlibat didalamnya, terutama pengurus barang pengguna. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi, dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh BKAD tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melainkan masih terdapat berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Adapun hambatan-hambatan yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kota Kendari adalah sebagai berikut Kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Jambi

- a. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- c. Koneksi jaringan SIPKD sering bermasalah

3.3 Upaya Yang Dilakukan

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada BKAD Kota Kendari telah berjalan secara optimal sesuai dengan konsep pengelolaan, peraturan normatif, serta berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengelolaan aset tetap juga dilakukan oleh para pengurus barang pengguna OPD dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan aset tetap, hal ini menuntut BKAD utamanya bidang aset selaku pembantu pengelola dan pusat pengelolaan aset daerah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan guna mengoptimalkan proses pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mempertahankan opini WTP, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Kendari;
- b. Mengajukan usulan tambahan formasi personel bidang aset;
- c. Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) ;
- d. Merintis penerapan aplikasi SIPKD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kota Kendari;
- e. Melakukan penjemputan data inventaris aset ke masing- masing OPD.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Laporan sebagai alat yang penting untuk mendapatkan informasi-informasi yang terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan hasil-hasil yang sudah dicapai dan dijadikan acuan pengambilan keputusan di masa depan. oleh karena itu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah harus sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP). Setelah penyusunan laporan keuangan selesai maka di serahkan ke BPK akan memberikan Opini.

Opini atau pendapat yang menunjukkan kualitas laporan yang baik adalah opini Wajar Tanpa Pengucualian(WTP) oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan hingga memperoleh ataupun mempertahankan WTP.

Pengelolaan aset ternyata cukup berpengaruh besar pada laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan opini atau pendapat yang berdasarkan hasil dari pemeriksaan auditor berdasarkan proses yang dilakukan. Opini tersebut merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan yang menjadi penilaian atas kualitas pengelolaan anggaran yang sudah di sediakan.

Rata-rata setiap daerah tidak terkecuali di lokus penelitian peneliti yaitu Kota Kendari Walaupun LKPD nya mendapat opini WTP namun tidak pernah terlepas dari catatan kecil dari BPK mengenai pengelolaan aset .Oleh karena itu setiap daerah terus berupaya dan mencari cara bagaimana mengoptimalkan pengelolaan aset terutama aset tetap demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kota Kendari belum dilaksanakan secara maksimal meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala atau berupa hambatan dalam proses pelaksanaan optimalisasi pengelolaan aset tetap di Kota Kendari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap adalah Kesulitan memperoleh dokumen,Adanya oknum tidak menandatangani surat berita acara,Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi ,Kurangnya Kesadaran Pemerintah dalam mengidentifikasi dan menganalisis aset tetap yang Potensial,Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam meningkatkan pengelolaan aset tetap adalah Melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan,Melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR,Mengajukan usulan tambahan formasi personel Pegawai,Mengidentifikasi kembali dan menggandeng investor luar dalam meningkatkan aset tetap yang potensial,Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Keterbatasan Penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan di satu OPD saja dengan menggunakan teori Siregar

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi pengelolaan

Aset tetap dalam mempertahankan LKPD opini Wajar tanpa Pengecualian di BKAD Kota Kendari untuk hasil yang lebih mendalam .

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BKAD Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adi sasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Aidi , Ali Muhammad. 2014. *Analisis optimalisasi pelayanan masyarakat*. Samarinda: ejournal Ilmu administrasi

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

Berg, Bruce I. 2010. *QuAlitative Research Method For The Social Science*. Unitade State of America

CresweII, John W. 2013. *QuAlitative Inquiry and Reasearch Design*. Ios Angeles: SAGE Publication

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan keuangan pusat dan daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Dr. Rukin, S.Pd, M.Si, (2019). *MetodoLogi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendi kia Indonesia

Hadi nata, Acep. 2011. *Bahan Ajar Manajemen Aset*. Jakarta: STAN

Mahmudi . 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

_____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Nasution, S.(2012). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara

Sanjaya. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Perkembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendi di kan)*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sholeh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Bandung: Fokusmedia

Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: GhAlia Indonesia

_____. 2015. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sukmawati,I.,Kusumastuti,E.D.,Abdullah,S.J. 2019. *“Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening”*. Indonesian Accounting Research Journal,Vol. 1 pp. 299 – 306

Molle,P. 2017. *“Strategi Pengelolaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Opini Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”*

Rahmadani, K. 2016 *“Strategi Mempertahankan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual”*

Wartuny,S. 2020 *“Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi,Volume 1, Nomor 1. Hlm 22 – 33.*

Maulidi ah,Sri. 2017 *“Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah”*.Vol. lii Nomor 1 April 2017